

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan fenomena sosial klasik yang sudah melekat dalam masyarakat. Keyakinan tentang kenyataan bahwa kemiskinan tidak bisa dientaskan, melainkan hanya dikurangi jumlahnya dan diminimalkan penderitaan masyarakat miskin itu sendiri, demikian halnya dengan yang terjadi pada masyarakat. Bila dilihat dalam konteks agama sebenarnya jauh lebih jelas. Dalam Islam dibedakan secara tegas antara mereka yang disebut sebagai miskin dan mereka yang masuk golongan fakir, orang miskin adalah mereka yang tidak atau kurang memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan primer dalam kehidupannya, sementara orang fakir adalah mereka yang memiliki potensi yang belum direalisasikan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.¹

Masalah kemiskinan memang telah lama ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern. Mengatasi kemiskinan bukanlah usaha yang mudah dan sederhana, tetapi harus dilakukan dengan perencanaan yang terintegrasi dan terkoordinir dengan baik dengan bermacam macam kebijakan yang harus tercermin dalam setiap kebijakan pemerintah dan dilakukan secara bersama sama

¹ Muhtadi Ridwan, *Geliat Ekonomi Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hal. 3

oleh pemerintah dan masyarakat dalam waktu yang relatif panjang dan berkelanjutan.²

Di Indonesia, kemiskinan merupakan masalah yang sangat krusial, tidak hanya karena tendensinya yang semakin meningkat, namun juga konsekuensinya yang tidak hanya meliputi ruang lingkup ekonomi semata namun juga masalah sosial dan instabilitas politik dalam negeri. Oleh karena itu, pengentasan masalah kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan bangsa, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Secara umum hal hal yang menyebabkan tingginya kemiskinan di Indonesia seperti tingginya angka pengangguran, taraf hidup masyarakat yang buruk, tingkat pendidikan yang rendah dan lain sebagainya.

Berbicara mengenai kemiskinan di Indonesia salah satu hal yang menjadi pemicu naiknya angka kemiskinan di Indonesia adalah banyaknya ditemui di kota maupun kabupaten yaitu gelandangan, pengemis, fakir miskin yang tergabung dalam PMKS yang disingkat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Istilah ini disematkan kepada seorang, keluarga, atau kelompok yang memiliki kesulitan atau gangguan sehingga tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik. Menurut data Kemensos RI, tercatat ada 26 jenis PMKS dengan batasan kriteria tertentu. Permasalahan PMKS sudah bukan lagi menjadi masalah baru di Indonesia, terutama di kota di kota besar. Salah satu contohnya di kota Bukittinggi. Hal ini dikarenakan semakin bertambah tahun semakin bertambah juga penduduk tentu jelas bertambah juga angka PMKS. Mentalitas yang buruk

² Muhadam Labolo, Memahami Ilmu Pemerintahan, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), hal. 206

dan tidak ada keinginan untuk melawan kemiskinan sehingga banyak orang Indonesia memilih hidup dengan berharap pada belas kasihan orang lain. Hal ini mungkin juga terjadi karena keterbatasan pendidikan, keterampilan dan modal memaksa mereka bergumul dengan kerasnya hidup dan kesempitannya persaingan pekerjaan di kota-kota.³

Tabel 1.1 Perbandingan data PMKS di 3 Kota pada tahun 2019

No	Jenis PMKS	Bukitinggi	P.Panjang	Sawahlunto
1.	Anak Balita Terlantar	-	-	-
2.	Anak Terlantar	94	57	18
3.	Anak Yang berhadapan Dengan Hukum	2	6	1
4.	Anak Jalanan	9	-	-
5.	Anak Dengan Kedisabilitas	74	64	71
6.	Anak Korban Tindak Kekerasan	-	-	-
7.	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	6	-	2
8.	Lanjut Usia Terlantar	383	266	636
9.	Penyandang Disabilitas	195	217	417
10.	Tuna Susila	-	-	-
11.	Gelandangan	5	-	-
12.	Pengemis	12	3	-
13.	Pemulung	39	1	-
14.	Kelompok Minoritas	3	-	-
15.	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan	11	-	6
16.	Orang Dengan HIV/AIDS	-	-	-
17.	Korban Penyalahgunaan Napza	7	13	3
18.	Korban Trafiiicking	-	-	-
19.	Korban Tindak Kekerasan	-	-	-
20.	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	-	-	-
21.	Korban Bencana Alam	614	-	-
22.	Korban Bencana Sosial	151	-	-
23.	Perempuan Rawan Sosial	724	259	337
24.	Fakir Miskin	5742	2985	2778

³ Muchlis Laksmana Putra, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Daerah Istimewa Yogyakarta.* (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum Yogyakarta, 2019) 4.

25.	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	240	3	-
26.	Komunitas Adat Terpencil	-	-	-

Sumber : Data PMKS Dinas Sosial Provinsi Sumbar

Tabel 1.2 Perbandingan data PMKS di 3 Kota pada tahun 2020

No	Jenis PMKS	Bukitinggi	P.Panjang	Sawahlu nto
1.	Anak Balita Terlantar	6	-	-
2.	Anak Terlantar	108	50	15
3.	Anak Yang berhadapan Dengan Hukum	3	-	45
4.	Anak Jalanan	8	-	-
5.	Anak Dengan Kedisabilitasan	33	98	13
6.	Anak Korban Tindak Kekerasan	3	-	-
7.	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	28	-	2
8.	Lanjut Usia Terlantar	401	279	635
9.	Penyandang Disabilitas	181	224	387
10.	Tuna Susila	-	-	-
11.	Gelandangan	4	2	-
12.	Pengemis	4	3	-
13.	Pemulung	11	5	-
14.	Kelompok Minoritas	1	-	-
15.	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	10	2	6
16.	Orang Dengan HIV/AIDS	1	-	-
17.	Korban Penyalahgunaan Napza	3	9	1
18.	Korban Trafikiing	-	-	-
19.	Korban Tindak Kekerasan	35	-	-
20.	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	-	-	-
21.	Korban Bencana Alam	-	-	-
22.	Korban Bencana Sosial	1	-	3
23.	Perempuan Rawan Sosial	490	228	339
24.	Fakir Miskin	5231	428	2675
25.	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	35	4	1
26.	Komunitas Adat Terpencil	-	-	-

Sumber : Data PMKS Dinas Sosial Kota Bukittinggi tahun 2019-2021

Setelah melihat perbandingan Data PMKS selama 2 Tahun di 3 Kota diatas, pada tahun 2019 terdapat 2 indikator yang PMKS yang membuat Kota Bukittinggi unggul jauh yaitu pada angka Fakr Miskin dan Perempuan Rawan Sosial . Angka Fakir Miskin menyentuh lebih dari lima ribu jiwa sedangkan angka

Perempuan Rawan Sosial hampir mencapai seratus jiwa, sedangkan pada tahun 2020 angka Fakir miskin turun di ketiga Kota namun hanya Kota Padang Panjang yang berhasil turun signifikan walaupun Kota Bukittinggi walaupun turun tapi hanya sedikit. Sedangkan pada indikator Anak terlantar dan Perempuan Rawan Sosial Kota Bukittinggi kembali mengungguli dua Kota pembandingnya.

Secara umum pemberdayaan PMKS terus di bantu dan difasilitasi penanggulangannya melalui program Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Lembaga, instansi ataupun organisasi masyarakat yang bergerak dalam penanggulangan masalah sosial Peningkatan kasus umumnya terjadi dengan meningkatnya upaya penemuan kasus sehingga dapat di data dan dilakukan penanganan. Penanganan PMKS menjadi program prioritas pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Untuk menangani PMKS tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah, tetapi semua pihak, perlu ada sinergitas antara Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Persoalan mendasar PMKS adalah tidak terpenuhinya pelayanan sosial dasar seperti Kesehatan, Pendidikan, sandang, papan, dan kebutuhan dasar lainnya. Para PMKS harus diberdayakan dan dilatih untuk bisa hidup mandiri secara ekonomi. Jenis pelayanan dasar bidang sosial mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Pemberdayaan PMKS merupakan salah satu upaya strategis secara nasional dalam mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan

terlindunginya hak asasi manusia terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu dibutuhkan strategi dan perencanaan yang matang dari pemerintah terkait dengan pemberdayaan PMKS. Pemerintah kota Bukittinggi telah melakukan beberapa strategi dalam melakukan pemberdayaan masyarakat miskin diantaranya seperti, Perda nomor 11 tahun 2019 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pelatihan terhadap PMKS seperti pelatihan menjahit, pelatihan mental spiritual, serta bantuan seperti bantuan modal usaha dan bantuan terhadap kelompok usaha bersama.

Dari penelusuran penulis setidaknya terdapat 4 penelitian yang berkaitan dengan strategi pemberdayaan masyarakat miskin dan dapat dijadikan analisis penelitian terdahulu diantaranya, pertama penelitian tentang pemberdayaan ini pernah dilakukan oleh Oktarina Dwi Handayani dalam skripsinya dengan judul Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MD) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Pesalakan kecamatan Bandar, Batang. Penelitian ini lebih berfokus kepada pemberdayaan perempuan di desa sedangkan peneliti lebih kepada pemberdayaan masyarakat miskin di kota.⁴

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Firnawati, Muhammadiyah, dan Ansyari Monne dengan judul Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Pengangguran di Kota Makassar. Penelitian ini lebih berfokus kepada strategi

⁴ Oktarina Dwi. (2006). *Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MD) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Pesalakan kecamatan Bandar, Batang*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta; Yogyakarta.

yang dilakukan pemerintah terhadap penghancuran sedangkan peneliti lebih ke pemberdayaan masyarakat miskin.⁵

Ketiga, skripsi penelitian yang dilakukan oleh Rasbin dengan judul Peran Pemerintah Daerah dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran : Studi Kasus di Kota Yogyakarta dan Malang. Penelitian ini berfokus kepada peran Pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran sedangkan peneliti lebih ke strategi pemerintah dalam memberdayakan masyarakat miskin.⁶

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Suprizal R dengan judul Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Kemiskinan di Desa Teluk Pulau Kecamatan Pasir Limau Kapas. Penelitian ini lebih berfokus untuk melihat bagaimana strategi pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan di desa sedangkan peneliti berfokus kepada strategi pemerintah kota dalam membedakan masyarakat miskin di kota.⁷

Hal yang menjadi kebaruan dari penelitian ini adalah penelitian ini ingin melihat strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bukittinggi dalam melakukan pemberdayaan terhadap PMKS karena sebelumnya belum ada juga yang meneliti tentang strategi pemerintah dalam pemberdayaan PMKS di Kota Bukittinggi. Peneliti juga melihat bahwa fenomena meningkatnya jumlah fakir miskin di Kota Bukittinggi berdasarkan pada data PMKS Kota Bukittinggi dalam

⁵ Firnawati, F., Muhammadiyah, M., & Mone, A. (2016). Peran Pemerintah dalam penanggulangan pengangguran di Kota Makassar. Kolaborasi: *Jurnal Administrasi Publik*, 2(3), 237-251.

⁶ Rasbin, R. (2020). Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran: Studi Di Kota Yogyakarta Dan Malang. *Kajian*, 23(2), 129-142.

⁷ Suprizal R,(2019) Strategi *Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Kemiskinan di Desa Teluk Pulau Kecamatan Pasir Limau Kapas*. Medan, UIN Sumatra Utara.

3 tahun terakhir. Berdasarkan 4 Kajian Penelitian terdahulu di atas sudah dilihat sedikit persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, yang menjadi pembeda dengan penelitian terdahulu yaitu pada fokus penelitian ini lebih berfokus kepada pemberdayaan PMKS melalui analisis strategi yang dijalankan pemerintah Kota Bukittinggi dalam rangka memberdayakan PMKS di Kota Bukittinggi. Perbedaan juga ditemukan pada lokasi penelitian, fokus penelitian dan teori yang digunakan dalam penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial di Indonesia disingkat dengan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Penyandang PMKS memiliki banyak kategori golongan diantaranya : anak balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitasan (ADK), anak yang menjadi korban tindak kekerasan, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan (BWBLP), orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban penyalahgunaan NAPZA, korban trafficking, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial (PMBS), korban bencana alam, korban bencana sosial, perempuan rawan sosial ekonomi, fakir miskin, keluarga bermasalah sosial psikologi.⁸

⁸ <https://dinsos.tasikmalayakota.go.id/pmks-psks/> diakses pada 8 Januari 2023

Jumlah PMKS ini cukup mengkhawatirkan di Indonesia, tercatat dalam beberapa tahun terakhir ini jumlah PMKS masih banyak, walaupun ada kategori yang turun akan tetapi tidak turun secara signifikan. Sebagai contoh kita lihat pada Kota Bukittinggi dalam 3 tahun terakhir ini dalam data dari Dinas Sosial Sumatera Barat berikut ini :⁹

Tabel 1.2 Data PMKS Kota Bukittinggi dalam 3 tahun terakhir

No	Jenis PMKS	2019	2020	2021
1.	Anak Balita Terlantar	-	6	1
2.	Anak Terlantar	94	108	42
3.	Anak Yang berhadapan Dengan Hukum	2	3	2
4.	Anak Jalanan	9	8	-
5.	Anak Dengan Kedisabilitas	74	33	50
6.	Anak Korban Tindak Kekerasan	-	3	-
7.	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	6	28	1
8.	Lanjut Usia Terlantar	383	401	450
9.	Penyandang Disabilitas	195	181	165
10.	Tuna Susila	-	-	-
11.	Gelandangan	5	4	1
12.	Pengemis	12	4	1
13.	Pemulung	39	11	22
14.	Kelompok Minoritas	3	1	-
15.	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	11	10	7
16.	Orang Dengan HIV/AIDS	-	1	-
17.	Korban Penyalahgunaan Napza	7	3	3
18.	Korban Trafiiicking	-	-	-
19.	Korban Tindak Kekerasan	-	35	-
20.	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	-	-	-
21.	Korban Bencana Alam	614	-	-
22.	Korban Bencana Sosial	151	1	-
23.	Perempuan Rawan Sosial	724	490	632
24.	Fakir Miskin	5742	5231	4977
25.	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	240	35	19
26.	Komunitas Adat Terpencil	-	-	-

Sumber : Data PMKS Dinas Sosial Kota Bukittinggi tahun 2019-2021

⁹ Arsip data PMKS Dinas Sosial kota Bukittinggi di ambil pada 23 Januari 2023

Berdasarkan data PMKS Kota Bukittinggi dalam tiga tahun terakhir ini, tidak dapat di pungkiri bahwa populasi dari beberapa indikator jenis PMKS ada yang turun. Tetapi turunnya tidak terlalu signifikan. Indikator PMKS yang cukup mencolok adalah fakir miskin, karena terlihat dari jumlahnya jauh berkali kali lipat dari jenis PMKS lainnya, tercatat dalam tiga tahun terakhir jumlah fakir miskin menyentuh angka lebih dari lima ribu jiwa, walaupun ada penurunan dalam tiga tahun terakhir akan tetapi tidak terlalu terlihat. Ini baru jumlah fakir miskin di kota Bukittinggi belum dikota kota besar lainnya. Hal ini tentu menjadi perhatian besar bagi pemerintah selaku badan yang memiliki kewajiban dan fasilitator dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya.

Pemerintah sejatinya sudah mengambil langkah terkait hal ini sudah sejak zaman kemerdekaan dengan undang-undang dasar 1945 secara tegas dan jelas telah memberikan tugas kepada negara untuk memberikan pelayanan sosial kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar bahkan mereka berada dibawah tanggung jawab pemerintah, hal ini sesuai pasal 34 UUD 1945.

(1) “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”

(2) menegaskan “negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”¹⁰

Masalah PMKS pada zaman sekarang merupakan suatu masalah yang cukup meresahkan karena di beberapa kota menunjukkan tren meningkat dari

¹⁰ UUD 1945 pasal 34

tahun ke tahun, meskipun ada juga yang mengalami penurunan tetapi tidak signifikan, yang mengakibatkan penyalahgunaan hak-hak fakir miskin oleh oknum yang tidak bertanggung jawab seperti eksploitasi anak dibawah umur untuk mengemis, mengamen, lansia yang mengemis, anak berhenti sekolah, sehingga fakir miskin ini rentan akan kriminalitas dan eksploitasi. Pemerintah juga memberikan respon lanjutan dari pasal 34 UUD 1945 yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin yang jelas bertujuan untuk mensejahterakan fakir miskin yang lebih terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir miskin bertujuan agar fakir miskin dapat memperoleh hak mereka selaku sebagai warga negara yang tidak mampu, baik dalam hal perekonomian keluarga yang tidak mempunyai mata pencaharian sama sekali. Dan atau mempunyai sumber mata pencaharian namun belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan. Namun hingga saat ini implementasi dari UU ini belum memperlihatkan hasil yang signifikan karena faktanya hingga saat ini jumlah fakir miskin masih banyak di Indonesia, seperti contohnya di kota Bukittinggi yang masih menyentuh angka lebih dari lima ribu jiwa. Hal ini tentu jadi bahan renungan dan evaluasi bagi pemerintah yang menjadi penanggung jawab hak warga negara tentunya.

Dalam rangka mengatasi masalah PMKS Pemerintah Kota Bukittinggi dan beberapa pihak terkait telah melakukan beberapa langkah kebijakan dalam melakukan pemberdayaan PMKS diantaranya, Merancang dan melaksanakan

Perda Kota Bukittinggi nomor 11 tahun 2019 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam rangka mensejahterakan masyarakat miskin dan mengurangi angka kemiskinan di Kota Bukittinggi. Pemerintah Kota Bukittinggi bersama Dinas Sosial pada tahun 2019 telah mengesahkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi nomor 11 tahun 2019 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pengesahan perda ini tentunya diharapkan dapat mensejahterakan rakyat miskin dan dapat mengurangi dan menekan angka kemiskinan di Kota Bukittinggi. Dalam perda nomor 11 tahun 2019 penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dimaksud terdapat pada Pasal 12 yaitu : Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi: rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial. Namun dilihat dari pelaksanaan yang telah disahkan dari 5 tahun yang lalu tampaknya perda ini belum terlaksana dengan baik mengingat angka kemiskinan di Kota Bukittinggi masih tinggi dan angka PMKS fakir miskin masih jadi yang terbanyak diantara PMKS lainnya.

Selanjutnya yaitu Pemberian bantuan terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE). KUBE merupakan salah satu solusi untuk mengurangi pengangguran di daerah, sebagai peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta mengoptimalkan masalah sosial yang mendesak dengan potensi yang ada. Program KUBE harus memperhatikan pola hidup yang terjadi di masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan anggota untuk berusaha bersama dalam kelompok, peningkatan pendapatan, pengembangan usaha dan peningkatan kepedulian sosial

dan solidaritas antara anggota dengan masyarakat sekitar.¹¹ Selain pemberian bantuan terhadap Kelompok Usaha Bersama ada juga berbagai macam pelatihan pelatihan yang di insiasi pemerintah Kota Bukittinggi bersama instansi terkait seperti pelatihan menjahit bagi PMKS bersama Dinas Sosial dan bimbingan mental spiritual yang di insiasi pemerintah terhadap PMKS dan pelatihan pelatihan lainnya yang berguna dalam memberdayakan PMKS.

Yang terbaru ada Program Baling Bambu yang merupakan program terbaru yang digagas Wali Kota Erman Safar, program Baling Bambu adalah singkatan dari Bantu Sekeliling Bantu Semampumu, itu merupakan strategi percepatan pengentasan kemiskinan di Kota Bukittinggi. Kebijakan ini ditetapkan melalui Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-210-2023 Tentang Baling Bambu Sebagai Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Daerah. Untuk implementasinya Baling Bambu, telah disalurkan bantuan kepada masyarakat miskin melalui LKKS, BUMD, Baznas dan keluarga pioner yang telah disinkronkan dengan dinas sosial yang langsung diberikan kepada masyarakat miskin di Kota Bukittinggi, bantuan yang disalurkan sesuai kebutuhan masyarakat miskin baik berupa sembako, bantuan anak sekolah ataupun bantuan lainnya¹²

Berdasarkan data yang ada dan dikaitkan dengan teori yang digunakan, peneliti berasumsi bahwa pemberdayaan yang dilakukan pemerintah Kota Bukittinggi masih belum terlaksana dengan baik, mengingat angka PMKS masih belum stabil. Oleh karena fenomena diatas maka masalah pertanyaan penelitian

¹¹ Istiana Hermawati. (2006). *Ujicoba Model KUBE dalam Pengentasan Keluarga Miskin*. Yogyakarta: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Hal 7

¹² Dilihat di (sumbar.antaraneews.com) diakses pada 2 Agustus 2023

adalah, Bagaimana strategi pemberdayaan PMKS yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun 2019 - 2022 ?

1.3 Tujuan penelitian

Seperti yang sudah dijelaskan dan dipaparkan dalam latar belakang di atas, tujuan penelitian ini adalah: Untuk menjelaskan dan menganalisis strategi pemberdayaan PMKS yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi.

1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian lanjutan bagi peneliti berikutnya yang ingin mendalami kajian tentang pemberdayaan PMKS.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka ide bagi instansi terkait dalam masalah pemberdayaan PMKS Kota Bukittinggi.



